

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Hisnol Djamali

Email: hisnol.jamali60@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (Stiem Bongaya) Makassar, Indonesia

Corresponding Author

Nama Author : Hisnol Djamali. Tel./Hp.081355439189

Email: hisnol.jamali60@gmail.com

*Received: 22 Januari 2022, Revised: 27 Januari 2022, Accepted: 29 Januari 2022,
Published : 28 Februari 2022*

Abstrak : Tujuan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Populasi dalam penelitian ini adalah 65 aparat desa Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Teknik Sampel menggunakan sampling jenuh sehingga sampel 65 aparat desa. Metode analisis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa

Kata kunci: Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract : *The purpose of the study was to examine the factors that influence the quality of the village government's financial reports in Bissappu District, Bantaeng Regency. The population in this study were 65 village officials, Bissappu District, Bantaeng Regency. The sample technique used saturated sampling so that the sample was 65 village officials. The method of analysis is multiple linear regression analysis.*

The results of the study show that the village financial system and internal control system have a significant positive effect on the quality of village government financial reports

Keywords: *Village Financial System, Internal Control System, Quality of Financial Reports*

I. PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan. Desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintahannya sendiri termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap laporan keuangan desa yang disajikan harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Laporan Keuangan Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja yang berhubungan dengan keuangan selama periode tertentu kepada para pengguna laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam laporan keuangan seluruh informasi mengenai keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna perlu disajikan dan tentu informasi yang disajikan tersebut harus berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan mencakup informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

BPKP RI (2018 : 3) menyatakan sistem keuangan desa merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem keuangan desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Apabila teknologi informasi dimanfaatkan dengan tepat maka dapat memperlancar proses dalam implementasi sistem keuangan desa yang dilakukan aparatur desa. Semakin baik sistem keuangan desa yang diterapkan maka laporannya akan semakin berkualitas

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset Negara, dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem keuangan desa dan kompetensi aparatur saja tetapi kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian Intern.

Dana desa menjadi suatu hal yang sangat menggiurkan untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya ada didaerah kecil dan pelosok yang menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang turut mendukung dalam pencegahan tindakan pidana korupsi pada dana desa yakni dengan mengeluarkan Permendes PDTT Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga Rp 46,9 Triliun untuk 74,7 ribu desa (www.republika.co.id). Dengan pengelolaan dana desa yang diawasi dengan baik maka laporan keuangan desa akan menjadi berkualitas. Selain itu kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh Sistem Keuangan Desa dan sistem pengendalian intern

Penelitian sehubungan dengan tema penilaian ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Rifandi (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan

Wates Kabupaten Kulon Progo. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda,dkk (2018) menyatakan bahwa Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Setiadi & Devi 2020 hasil penelitian menunjukkan Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan menguji pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

II. LITERATUR REVIEW

Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Yuliansya dan Rusmianto (2016:47) menjelaskan pengelolaan atas keuangan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- c. Penatausahaan keuangan merupakan kegiatan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- d. Pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota oleh Kepala Desa melalui camat. yang terdiri dari terdiri dari: (a). laporan pelaksanaan APB Desa; dan (b). laporan realisasi kegiatan.
- e. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota oleh Kepala Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari :
 - 1) Laporan keuangan, terdiri atas: (a). laporan realisasi APB Desa; dan (b). catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
 - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Erlina, dkk (2015: 23) dan PP 71 Tahun 2020 mengemukakan komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah menyajikan laporan keuangan sebanyak 7 (tujuh) jenis laporan keuangan, namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa hanya terdiri dari laporan ;

- a. Laporan keuangan, terdiri atas: (1). laporan realisasi APB Desa; dan (2). catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Dengan demikian Pemerintah Desa belum diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai yang lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik untuk memenuhi prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang di kehendaki:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Sistem Keuangan Desa

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi yang di buat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban (BPKP RI,2018:3). Dengan demikian dalam aplikasi Siskeudes dilengkapi dengan 4 aplikasi yang dirancang sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yakni (BPKP RI (2018:22) :

- a. Perencanaan
- b. Penganggaran
- c. Pelaksanaan/Penatausahaan

d. Pembukuan

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Kieso, dkk (2013: 354) Pengendalian Internal (*internal control*) merupakan metode dan tindakan terkait yang diadopsi dalam sebuah organisasi untuk melindungi asetnya, meningkatkan keandalan catatan akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan unsur sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari :

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Pengaruh sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa

Sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan penata keuangan desa. Dengan adanya aplikasi ini memberikan kemudahan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. Semakin efektif sistem aplikasi ini diterapkan maka kualitas laporan keuangan pemerintah semakin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivandi (2019) menunjukkan Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H₁ : Sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan desa

Keterandalan dalam penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu tujuan dari penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern maka semakin berkualitas penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiadi & Devi (2020) menunjukkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

III. METODOLOGI

Metode

Penelitian ini dilakukan dikecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparat Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sample jenuh yakni seluruh anggota populasi dijadikan sample yakni sebanyak 65 Apartur desa. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Uji instrument penelitian melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik serta Metode analisis yaitu analisis statistic deskriptif dan analisis regresi berganda

Hasil

Hasil perhitungan koefisien regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

| Variabel | Nilai Koefisien | Nilai t hitung | Nilai prob |
|----------------|-----------------|----------------|------------|
| Konstanta | 3,834 | 1.535 | 0.130 |
| Siskeudes (X1) | 0,234 | 2394 | 0.020 |
| SPI (X2) | 0,589 | 5705 | 0.000 |

Variabel Dependen : Kualitas LK (Y)

Sumber : Data diolah tahun 2021

$$Y = 3.834 + 0.234X_1 + 0.589X_2 + e$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta 3.834 Hal ini menyatakan bahwa jika variable sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka kualitas laporan keuangan akan naik sebesar 3.834. Koefisien regresi pada variabel sistem keuangan desa bertanda positif sebesar 0,234 , hal ini berarti jika variabel sistem keuangan desa bertambah satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0.234 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian intern bertanda positif sebesar 0.589, hal ini berarti jika variabel sistem pengendalian intern bertambah satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0.589 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1 terlihat hasil uji hipotesis pertama (H_{a1}) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng di terima. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sistem keuangan desa (X1) sebesar 2.394 yang lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1.690 atau $t_{hitung} 2.394 > 1.690 t_{tabel}$. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan

signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,020 ($0,020 < 0,05$). Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel sistem keuangan desa (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Kemudian hipotesis kedua (Ha2) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng juga di terima. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} variabel sistem pengendalian intern (X3) sebesar 5.705 yang lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1.690 atau $t_{hitung} 0.5705 > 1.690 t_{tabel}$. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menjelaskan bahwa variabel sistem pengendalian intern (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa semakin baik Sistem Keuangan Desa maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang disediakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk mempermudah aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Sehingga sistem keuangan desa ini menjadi komponen penting dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Oleh karena itu Pemerintah setempat berupaya untuk terus meningkatkan keterampilan aparat desa dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa melalui pelatihan yang berhubungan dengan aplikasi sistem keuangan desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifandi (2019), Lisda, dkk (2018)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem penendalian intern yang baik maka upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan semakin baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiadi & Devi (2020) dan Lisda, dkk dkk (202018).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini dilakukan hanya pada satu kecamatan saja dikabupaten Bantaeng. Sebaiknya peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian pada beberapa Kecamatan. Penelitian ini hanya mengambil 2 variabel independen yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan sebaiknya peneliti selanjutnya menambah variable independent lain seperti kompetensi aparat dan lain lain

REFERENSI

- BPKP RI, 2018. Siskeudes:Sistem Keuangan Desa : Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0
- Erlina, dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Gayatri & Latrini, Made Yenni, (2018). Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa , *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, Juli 2018, Hal. 113 – 122
- Harrison,dkk, (2012). *Akuntansi Keuangan : International Financial Reporting Standard-IFRS*, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Penerbit PT Erlangga, Jakarta
- Kementerian Keuangan RI, 2019. Buku Pintar Dana Desa, Cetakan Kedua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Kieso, dkk, (2013). *Pengantar Akuntansi 1*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro, Mudjajad, 2007, *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Lisda, Ruslina, dkk, (2018). Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung Barat), *Prosiding, Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018 STMIK Atma Luhur Pangkalpinang*, 8 – 9 Maret 2018, Hal. 569-574
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Praptiningsih & Yetty, Fitri, (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Dan Administrasi Laporan Keuangan Desa, *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat* Vol. 5, No 1, February 2020: Hal. 103-208

Pujiswara, Ida Bagus, dkk, (2014). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Klungkung), *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No. 1 Tahun 2014

Pura, Rahman. (2013). *Pengantar Akuntansi 1 : Pendekatan Siklus Akuntansi*, PT Erlangga : Jakarta

Puspasari, Oktaviani Rita & Purnama, Dendi, (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 2, (2), 2018, Hal. 145-159

Rifandi, Zaizar Wiet, (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo), *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, Vol. 04 No. 01 April 2019, Hal. 1-17

Riswanto, dkk, (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, pemanfaatan system informasi keuangan dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota palu, *Jurnal Katalogis*, Vol 5 No.12 Desember 2017, Hal 34-42

Setiadi, Nyoman Dedi & Devi, Sunitha, (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes, *Jurnal Akuntansi Profesi*, VOL. 11 NO. 1 JUNI 2020, Hal.168-177

Setyowati, Lilis , dkk, (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, *Jurnal Kinerja*, Volume 20, No.2, Th. 2016: Hal. 179-191

Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, Alfabeta, Bandung

Sujarweni, V Wiratna, (2015). *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*, Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Tuanakotta, Theoderus, 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standars on Auditing)*, Salemba Empat. Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yuliansyah & Rusmianto, 2016. *Akuntansi Desa*, Salemba Empat. Jakarta



Sumber Internet

Kompas.com (Rabu, 13 Januari 2021) Korupsi Dana Desa Rp 261 Juta, Seorang Bendahara di NTT Ditahan Jaksa. Diakses tanggal 02 Februari 2021 dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/01/13/14390991/korupsi-dana-desa-rp-261-juta-seorang-bendahara-di-ntt-ditahan-jaksa>